

L
A
M
P
I
R
A
N

JUDUL : Delik Pidana UU ITE Perlu Dihapus Sekalian
SUMBER : Rakyat Merdeka
LINK : -
TANGGAL : Rabu, 30 Desember 2015
HALAMAN : 11

Delik Pidana UU ITE Perlu Dihapus Sekalian

PRESIDEN Jokowi melalui surat bernomor R-79/Pres/12/2015 tertanggal 21 Desember 2015 secara resmi menyampaikan naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Revisi UU ITE) kepada DPR.

Menurut pemerintah, Revisi UU ITE difokuskan untuk menghindari multi-tafsir terhadap penerapan Pasal 27 ayat (3) yang mengatur mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui sistem elektronik. Pemerintah mengusulkan pengurangan ancaman pidana dari semula 6 (enam) tahun menjadi 4 (empat) tahun dan menegaskan bahwa Pasal 27 ayat (3) merupakan delik aduan.

Peneliti Senior Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Anggota Suwahju menyatakan, ketidakpuasannya terhadap materi revisi tersebut dengan sejumlah alasan. Pertama, pemerintah seharusnya mencabut seluruh delik atau aturan pidana yang ada dalam UU ITE dan melakukan harmonisasi dengan Rancangan KUHP yang ada di DPR.

"Secara umum tidak ada pengaturan baru dalam UU ITE, begitu juga dalam Perubahan UU ITE. Semua aturan pidana atau delik tersebut telah termuat dalam KUHP dan juga dalam Rancangan KUHP," katanya.

Anggara menerangkan, melakukan perubahan parsial terhadap ancaman pidana hanya menunjukkan ketidak konsistenan pemerintah terhadap upaya politik kodifikasi total hukum pidana Indonesia.

Alasan kedua, perubahan ketentuan yang menyesuaikan dengan aturan KUHAP justru merupakan kemunduran total dalam upaya perubahan sistem peradilan pidana yang lebih menghormati hak asasi manusia.

"Seharusnya, seluruh upaya yang merampas kemerdekaan, seperti penangkapan dan penahanan, harus mendapatkan izin dari pengadilan terlebih dahulu," ujarnya.

Anggara menekankan, melakukan harmonisasi kepada KUHAP merupakan upaya yang secara mencederai prinsip-prinsip hak asasi manusia.

ICJR, lanjutnya, menyerukan kepada DPR dan pemerintah untuk membahas Revisi UU ITE dengan hati-hati terutama mengingat pada saat bersamaan sedang ada pembahasan Revisi KUHP di DPR yang juga krusial.

"ICJR mendorong agar DPR mencabut seluruh ketentuan pidana yang ada dalam UU ITE dan merupakan duplikasi tindak pidana yang telah ada dalam KUHP dan (nantinya) dalam RKUHP," kata Anggara.

Selain itu, pihaknya juga mendesak DPR untuk mem-

perkuat perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana dengan mempertahankan izin pengadilan untuk melakukan upaya penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan.

"Kami meminta DPR mengabaikan usulan pemerintah yang mengusulkan penyesuaian dengan ketentuan KUHAP," tandasnya.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan, pembahasan Revisi UU ITE akan dilakukan sesegera mungkin di kuartal pertama 2016. "Itu harus dibahas segera. Sekarang, DPR lagi masa reses," ujarnya.

Menurut Rudiantara, revisi yang kini sedang berada di DPR tersebut akan meliputi perihal hukuman pidana yang dimulai dari enam tahun menjadi empat tahun.

Selain itu dia juga meluruskan soal Pasal 27 ayat 3 yang menjadi delik aduan sehingga proses kasus tersebut akan dilakukan penyidik, jika ada laporan atau aduan dari pence maran nama baik.

"Ketentuan mengenai penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan disesuaikan sebagaimana proses yang diatur dalam hukum pidana. Ini dimaksudkan agar penerapan UU ITE sejalan dengan ketentuan yang ada di KUHAP," katanya. ■ OSP

JUDUL : Kaleidoskop September 2015: Tunjangan Jastel Hilang, PNS Eks Postel Geruduk Kantor Menkominfo

SUMBER : www.majalahict.com

LINK : <http://majalahict.com/berita-8932-kaleidoskop-september-2015-tunjangan-jastel-hilang-pns-eks-postel-geruduk-kantor-menkominfo.html>

TANGGAL : Rabu, 30 Desember 2015

HALAMAN : -

Kaleidoskop September 2015: Tunjangan Jastel Hilang, PNS Eks Postel Geruduk Kantor Menkominfo



MAJALAH ICT - Jakarta. Tidak mendapatkan kejelasan mengapa pendapatan bulanan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika berkurang, akhirnya pegawai negeri sipil di Kementerian di bawah Menteri Rudiantara ini melakukan *long march* dari

Gedung Sapta Pesona dan Gedung Medan Merdeka menggeruduk Kantor Menkominfo.

Dengan berpakaian serba putih, PNS di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Pos dan Informatika (SDPPI) dan Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) mempertanyakan mengapa pendapatan total yang selama ini diterimanya, dikurangi. Hal itu karena komponen pendapatan berupa biaya operasional pencapaian target atau diistilahkan dengan jastel, dihilangnya. Padahal, selama ini jastel diberikan sebagai insentif atas terpenuhinya target pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang dibebankan pada Kementerian Kominfo.

PNBP sejatinya memang lebih banyak dihasilkan dari satuan kerja yang dulunya di bawah Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Postel). Ditjen ini kemudian dipecah menjadi Ditjen SDPPI yang menyangkut PNBP bidang spektrum frekuensi dan sertifikasi, serta Ditjen PPI yang mendapatkan PNBP dari BHP Telekomunikasi dan BHP USO. Selama ini komponen pendapatan ini merupakan bagian dari pendapatan total yang didapat PNS di bawah dua Ditjen tersebut. Hanya saja, di tahun ini, insentif ini hilang begitu saja.

Bahkan, dinyatakan bahwa sejak 1992 insentif ini dinilai menyalahi aturan dan harus dikembalikan. "Ini bentuk kriminalisasi," kata seorang PNS kepada Majalah ICT. Sebab, artinya, ada berapa menteri yang terlibat dan mendapatkan jastel. Bahkan, hingga staf

khusus dan staf ahli menteri sejak zaman Menteri Kominfo di bawah Sofyan Djalil juga mendapat insentif.

Berkurangnya pendapatan, membuat PNS gelisah. "Sudah ada yang rumahnya disita bank gara-gara nggak cicilan. Ada yang sudah mau jual rumah. (Masalah ini) Perlahan memakan korban," kata PNS lainnya.

Sebenarnya, kasus ini juga mencuat tahun lalu. Namun kemudian, insentif akhirnya bisa dikeluarkan. Dan di tahun ini, batas waktu pencairan insentif hingga akhir Agustus telah terlewati, dan insentif yang dinanti tak kunjung dibagi. Jadilah aksi demo dan geruduk ke kantor menteri dilakoni.

Kegelisahan pegawai negeri sipil eks Direktorat Jenderal Postel yang kini berada di bawah Ditjen Sumbe Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) dan PPI (Penyelenggaraan Pos dan Informatika) Kementerian Komunikasi dan Informatika, mendapat tanggapan positif dari Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, setelah bertemu.

Hasil dari pertemuan, Menkominfo menjanjikan akan ada solusi dalam waktu 1 minggu ke depan. "Kita dijanjikan akan ada solusi mengenai berkurangnya pendapatan bulanan kami dalam waktu satu minggu," ungkap sebuah sumber Majalah ICT.

Dijelaskannya, Menkominfo akan membawa masalah ini ke tingkat yang lebih tinggi. Meski demikian, tambahnya, Menkominfo sempat mengisyaratkan bahwa tunjangan pencapaian target PNBPN ini yang sering disebut dengan jastel ini sudah merupakan masa lalu. "Namun akan dikonsepsikan tunjangan baru yang akan dimasukkan dalam Keppres," katanya. Meski demikian, Menteri berpesan, jika usahanya berhasil maka semua PNS yang ada dilarang 'nyambi' atau mencari tambahan lain di luar pekerjaannya yang dijalaninya sebagai aparatur sipil negara.

Hanya saja, janji satu minggu nampaknya juga tidak ada tanda-tanda dipenuhi. Hingga akhir September, nasib Jastel masih terkatung-katung bahkan diyakini tetap tidak juga bisa dicairkan.

JUDUL : Kaleidoskop September 2015: Pemerintah Berikan Ijin British Telecom Layani Komunikasi Data
SUMBER : www.majalahict.com
LINK : <http://majalahict.com/berita-8937-kaleidoskop-september-2015-pemerintah-berikan-ijin-british-telecom-layani-komunikasi-data.html>
TANGGAL : Rabu, 30 Desember 2015
HALAMAN : -

Kaleidoskop September 2015: Pemerintah Berikan Ijin British Telecom Layani Komunikasi Data



MAJALAH ICT - Jakarta. Pemerintah diam-diam kembali memberikan ijin perusahaan asing masuk dan memberikan layanan telekomunikasi. Terakhir, giliran British Telecom yang diganjar lisensi untuk memberikan layanan sistem komunikasi data (Siskomdat).

Dengan ijin ini, British Telecom bisa memberikan layanannya secara langsung untuk para pelanggan di Indonesia, termasuk penggunaan infrastruktur *fibre ring* yang baru dibangun di Singapura.

Ijin British Telecom diberikan Kementerian Komunikasi dan Informatika. "Lisensi telekomunikasi yang kami dapatkan di Indonesia ini merupakan sebuah langkah baru yang membanggakan dalam mendukung pelanggan kami di Asia Pasifik, Timur Tengah, dan Afrika (AMEA), serta seluruh dunia untuk mencapai kesuksesan. Kami senantiasa berinvestasi untuk memperkuat infrastruktur dan berkomitmen membantu para pelanggan memanfaatkan konektivitas global serta layanan enterprise berbasis cloud," ujar Kevin Taylor, Presiden BT Global Service untuk AMEA.

Pemberian lisensi ini tentu mengguncang peta kompetisi pemain komunikasi data dalam negeri. Pasalnya, selain British Telecom, telah hadir lebih dulu adalah operator seperti PT Sejahtera Globalindo, PT Sistelindo Mitralintas, PT Centrin Nuansa Teknologi, PT Berca Hardayaperkasa, PT Dini Nusa Kusuma, PT EDI Indonesia, PT Imani Prima, PT Patrakom, PT Aplikanusa Lintasarta, kemudian PT telkom, PT Indosat serta PT XL Axiata.

Pemberian lisensi Komunikasi Data untuk asing, menurut Founder IndoTelko Forum Doni Ismanto, sesuai Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2010 tentang Daftar Negatif Investasi (DNI), memang dimungkinkan. Namun begitu, katanya pemberian ini tentu mengundang tanya mengingat Kementerian Kominfo ingin membatasi pemain di sektor telekomunikasi dengan tidak menambah pemain, khususnya di pasar Siskomdat.

"Di siskomdat itu ada banyak pemain lokal selain Telkom, Indosat, dan XL. Kemenkominfo tidak memegang komitmen karena mengobrol lisensi. Katanya mau konsolidasi. Pada Mei 2011, Kemenkominfo pernah mengeluarkan lisensi bagi AT&T. Kemudian, mereka berjanji akan mengevaluasi pemain dan pasar siskomdat," sesal Doni.

Menurut Doni, Siskomdat merupakan industri *niche market* dengan standar tinggi. Akan ada kemungkinan perusahaan asing di Indonesia lebih memilih penyedia layanan siskomdat dari negara asalnya, ketimbang menggunakan jasa pemain lokal. "Pemain asing hanya memanfaatkan infrastruktur lokal dan nanti keluar pakai infrastruktur mereka. Mereka bangun infrastruktur tidak optimal. Ini akan mengancam pemain lokal. Perusahaan asing yang ada di Indonesia pasti akan memilih menggunakan jasa siskomdat yang diberikan perusahaan negara asalnya. Minimal 'all British co' akan lebih percaya ke BT. Kalau sudah begitu, nasib perusahaan siskomdat lokal bisa mati," pungkasnya.

No.	Media Cetak
1.	Bisnis Indonesia
2.	Investor Daily
3.	Koran Jakarta
4.	Kompas
5.	Koran Tempo
6.	Majalah Tempo
7.	Kontan
8.	Media Indonesia
9.	The Jakarta Post
10.	Koran Sindo
11.	Rakyat Merdeka
12.	Republika
13.	Sinar Harapan
14.	Suara Pembaruan
15.	Suara Karya

No.	Media Online
1.	www.detik.com
2.	www.majalahict.com
3.	www.antaraneews.com
4.	www.kompas.com
5.	www.republika.co.id
6.	www.beritasatu.com
7.	www.okezone.com
8.	www.viva.co.id
9.	www.metrotvnews.com
10.	www.bisnis.com
11.	www.tempo.co
12.	www.liputan6.com
13.	www.merdeka.com
14.	www.tribunnews.com

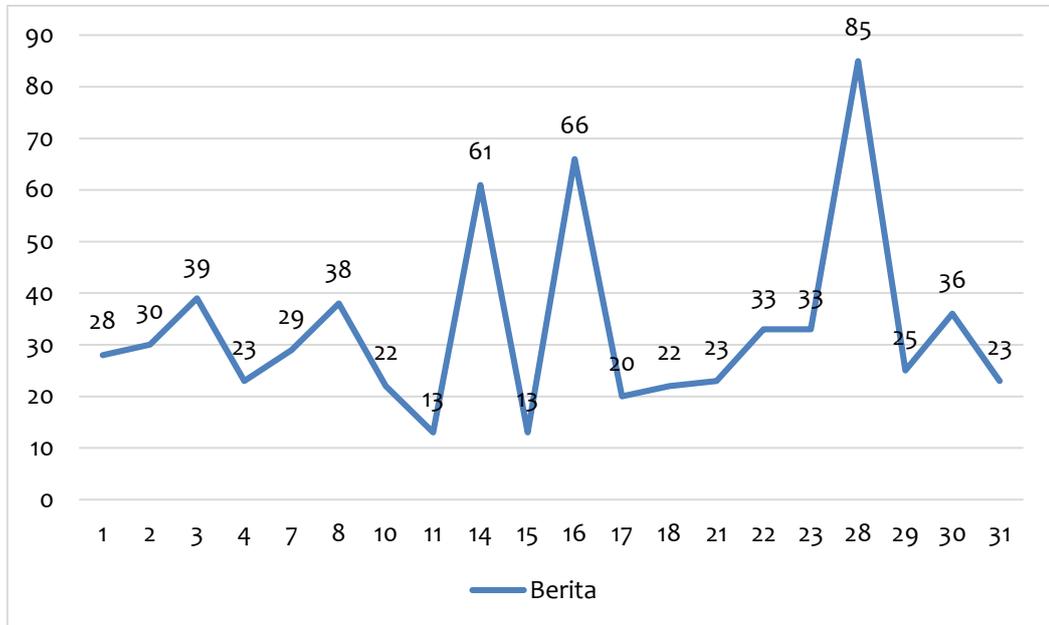
Berita di Media Cetak Bulan Desember

No	Media	Frekuensi Terbit	Jumlah Berita
1.	Bisnis Indonesia	19	43
2.	Investor Daily	14	20
3	Koran Jakarta	5	5
4.	Kompas	10	12
5.	Koran Tempo	1	1
6.	Majalah Tempo	0	0
7.	Kontan	10	14
8.	Media Indonesia	7	11
9.	The Jakarta Post	9	13
10.	Koran Sindo	8	9
11	Rakyat Merdeka	6	10
12.	Republika	3	3
13.	Sinar Harapan	0	0
14.	Suara Pembaruan	1	2
15.	Suara Karya	5	7
Jumlah		98	150

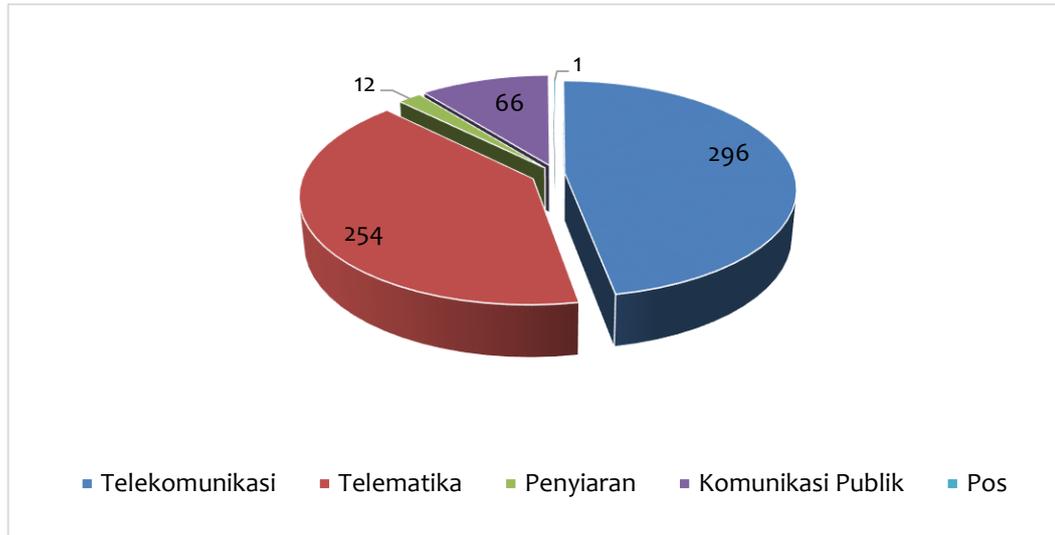
Berita di Media Online Bulan Desember

No	Media	Frekuensi Terbit	Jumlah Berita
1.	www.detik.com	18	89
2.	www.majalahict.com	17	98
3.	www.antaraneews.com	10	11
4.	www.kompas.com	15	32
5.	www.republika.co.id	3	6
6.	www.beritasatu.com	15	39
7.	www.okezone.com	14	25
8.	www.viva.co.id	18	47
9.	www.metrotvnews.com	12	21
10.	www.bisnis.com	12	20
11.	www.tempo.co	10	23
12.	www.liputan6.com	14	36
13.	www.merdeka.com	16	39
14.	www.tribunnews.com	9	14
Jumlah		183	500

Grafik Jumlah Berita Hasil Monitoring Desember 2015



Grafik Berita Sesuai Kategori Desember 2015



Berita Sesuai Kategori Setiap Harinya Bulan Desember 2015

Tanggal	Teleko- munikasi	Tele- matika	Penyiaran	Komunikasi Publik	Pos	Jumlah
1	6	17	3	2	-	28
2	16	9	1	4	-	30
3	11	25	1	2	-	39
4	7	12	2	2	-	23
7	15	9	-	5	-	29
8	24	12	-	1	1	38
10	11	11	-	-	-	22
11	4	8	-	1	-	13
14	39	19	1	2	-	61
15	8	3	-	2	-	13
16	42	14	1	9	-	66
17	15	2	-	3	-	20
18	6	8	-	8	-	22
21	6	10	-	7	-	23
23	19	10	-	4	-	33
28	45	36	2	2	-	85
29	3	22	-	-	-	25
30	12	17	-	7	-	36
31	7	10	1	5	-	23
Jumlah	296	254	12	66	1	650

**Kecenderungan Berita Bulan Desember 2015
di Media Massa**

Tanggal	Kecenderungan		Jumlah
	Positif	Negatif	
1	28	-	28
2	30	-	30
3	39	-	39
4	23	-	23
7	29	-	29
8	38	-	38
10	22	-	22
11	13	-	13
14	61	-	61
15	13	-	13
16	66	-	66
17	20	-	20
18	22	-	22
21	23	-	23
23	33	-	33
28	85	-	85
29	25	-	25
30	35	1	36
31	21	2	23
Jumlah	647	3	650



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

Menyajikan Masyarakat Informasi Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Pusat 10110 Telp./Faks : (021) 3504024 www.kominfo.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B. /6 /KOMINFO/SJ.8/UM.01.01/01/2016

Berdasarkan surat dari Kepala Peminatan Kehumasan Nomor: 105/D-
FIKOM/Ak.KKP/IX/2015 tanggal 29 September 2015 perihal Permohonan
Kuliah Kerja Praktek, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Ranti Ade Septiani
NIM : 2013-52-031
Fakultas/Konsentrasi : Ilmu Komunikasi/Public Relations
Perguruan Tinggi : Universitas Esa Unggul, Jakarta

Telah melaksanakan magang di Pusat Informasi dan Humas
Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 07 Desember 2015
s.d. 08 Januari 2016.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sesuai
dengan keperluan.

Jakarta, 8 Januari 2016

Kepala Pusat Informasi dan Humas,



Ismail Cawidu



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI
Jl. Medan Merdeka Barat No. 5 Jakarta 10110



PKL/PSG/PRAKERIN



MAGANG



PENELITIAN



RANTI ADE SEPTIANI

NIM/NIS : 201352034
INSTITUSI : UNIV. ESA UNGGUL
UNIT / SATKER : P 1 H
BERLAKU S/D : 31 DESEMBER 2015

Jakarta, 26 NOVEMBER 2015
Mengetahui,
Kepala Bagian Organisasi dan Tataaksana



Rita Amalidar, S.E., MM
NIP. 196612301985032003



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

Menajui Masyarakat Informasi Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Pusat 10110 Telp./Faks : (021) 3504024 www.kominfo.go.id

Penilaian Praktik Kerja Lapangan

Nama	: Ranti Ade Septiani	Lokasi Praktik Kerja Lapangan	
NIM	: 2013-52-031		
Universitas	: Universitas Esa Unggul, Jakarta	Instansi	: Kementerian Komunikasi dan Informatika
Fak/Jurusan	: Fakultas Ilmu Komunikasi/Public Relations	Unit Kerja	: Pusat Informasi dan Humas
		Bidang	: Humas
		Waktu Pelaksanaan	: 07 Desember 2015 - 08 Januari 2016
Penilaian Nilai			
A. Hasil Kerja			
1. Kualitas			93
2. Ketepatan Waktu dan Efisiensi			91
3. Kuantitas			92
B. Sikap Kerja			
1. Disiplin Waktu			92
2. Kehadiran			92
3. Kerjasama Tim			93
4. Etika Kerja			93
5. Inisiatif			93
C. Pribadi			
1. Performance			92
2. Keinginan untuk Maju			93
3. Tanggung Jawab			92
4. Trampil dan Tanggap			91
 Terdapat di bagian Pembimbing Teguh Wahyono			
Keterangan			
Baik Sekali	90 - 100		
Baik	75 - 89		
Cukup	60 - 74		
Kurang	< 60		



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
PUSAT INFORMASI DAN HUMAS
Meningkatkan Masyarakat Berkomunikasi

Nomor : 96 / KOMINFO/SJ.8/JUM.01.01 / / 07 / 2016

SERTIFIKAT

diberikan kepada:

Ranti Ade Septiani

Telah menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang diselenggarakan dari tanggal 07 Desember 2015 sampai dengan 08 Januari 2016 di Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat Kementerian Komunikasi dan Informatika Dengan Predikat: **Baik**



Jakarta, 15 Januari 2016
Pusat Informasi dan Humas
Ismail Cawidu M.Si
NIP : 195610171984031001



Soft Launching Sistem Penyampaian Informasi Kebencanaan



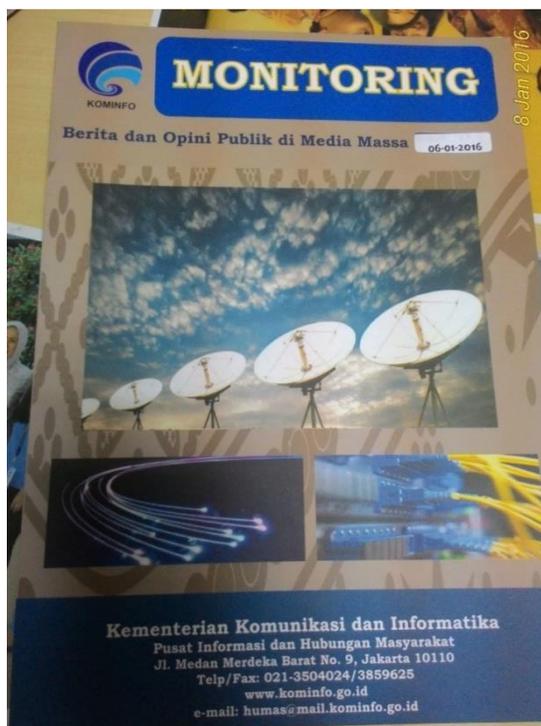
Bersama Kepala Sub Bidang Analisis Berita dan Pengelolaan Opini Publik dan staf



Bersama Bapak Menteri dan Telkomsel



Mencari berita di Media Cetak



Lembar Monitoring



Mencari berita di Media Online



Memotong berita yang sudah dipilih



Bersama dengan Kepala Pusat Informasi dan Humas
Bapak Ismail Cawidu



Bersama dengan Kepala Pusat Informasi dan Humas Bapak Teguh
Wahyono dan Mahasiswa Magang